

## Penguatan Gerakan Sosiokultural Sebagai Upaya Pencegahan Destruktif Kebangsaan

Abdul Rahman<sup>1</sup>, Nurlela<sup>2</sup>, Rifal<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email: abdul.rahman8304@unm.ac.id<sup>1</sup>

**Abstrak.** Artikel ini menguraikan tentang pentingnya gerakan sosiokultural dalam upaya meneguhkan semangat keindonesiaan di tengah pergaulan antar bangsa yang semakin mengglobal. Diakui, ada semacam kegundahan mencermati Indonesia saat ini yang plural dan multikultural diambang perseteruan sesama anak bangsa karena ketidaksepehaman dalam hal pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri bangsa ini telah bersusah payah untuk mbingkai Indonesia dalam satu rajutan kebersamaan dengan mengesampingkan perbedaan. Makanya, ketika cita-cita para pendiri bangsa ini harus terkubur dengan adanya ide-ide yang menegasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, maka segenap daya dan upaya harus dikerahkan untuk membendungnya. Masyarakat Islam yang mayoritas di negara ini harus mengambil peran untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dengan tetap berjuang mengedepankan nuansa-nuansa kemanusiaan dan menghindari jalan kekerasan agar Islam dapat menunjukkan eksistensinya sebagai rahmat bagi seluruh kehidupan.

**Abstract.** This article describes the importance of the socio-cultural movement in an effort to strengthen the Indonesian spirit in the midst of increasingly globalized relations between nations. Admittedly, there is a kind of anxiety over Indonesia that is plural and multicultural in the verge of fighting among fellow children of the nation because of disagreements in the management of national and state life. The founders of this nation have taken pains to frame Indonesia in one knit together by setting aside differences. Therefore, when the ideals of the founders of this nation must be buried with ideas that negate the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila, all efforts and efforts must be mobilized to contain it. The majority Muslim community in this country must take the role of maintaining the sovereignty of the Indonesian state while still striving to advance the nuances of humanity and avoid the path of violence so that Islam can show its existence as a blessing for all life.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk. Dalam pandangan J.S Furnivall, masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri dua atau lebih elemen yang hidup sendidri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik (Boty, 2017). Pandangan ini mengindikasikan bahwa kemajemukan suatu masyarakat akan menjadi faktor penghalang untuk mewujudkan sebuah integrasi karena masing-masing anggota masyarakat memiliki kesadaran bahwa mereka berbeda dengan yang lain. Akan tetapi, untuk konteks masyarakat Indonesia, nampaknya pandangan tersebut terbantahkan adanya. Kemajemukan tersebut justru menjadikan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dalam hal sejarah dan kebudayaan. Kemajemukan tersebut merupakan konsekuensi logis dari letak wilayah Indonesia yang menjadi jalur penghubung dua negara adidaya peradaban masa silam, yakni India dan Tiongkok. Posisi tersebut membuat wilayah Indonesia pada masa silam ramai dikunjungi oleh berbagai bangsa yang membawa masing-masing kebudayaannya yakni Bangsa Arab, Persia, Tiongkok, India, Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Jepang. Masing-masing kebudayaan dari bangsa-bangsa tersebut mengalami proses pembauran dengan kebudayaan

masyarakat Indonesia, yang keberadaannya masih dapat dijumpai hingga saat ini.

Kemajemukan Bangsa Indonesia itu juga ditandai dengan keanekaragaman Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat yang hidup, tumbuh, berkembang dan berupaya dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Keanekaragaman tersebut diharapkan dapat menjadi kekuatan Bangsa Indonesia baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, keanekaragaman tersebut dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dalam berbagai sektor kehidupan, dengan satu tujuan yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang dituangkan oleh para pendiri bangsa ini dalam mukaddimah (pembukaan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan secara eksternal, keanekaragaman tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan Bangsa Indonesia dalam pergaulan antara bangsa, sebagai media dalam menangkal anasir-anasir asing yang tidak berkesesuaian dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

Secara umum dipahami bahwa teori mengenai eksistensi sebuah negara ialah adanya wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang diakui kedaulatannya oleh negara lain. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dengan

proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 setelah melalui perjuangan panjang dan penuh tantangan untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan asing (Zuhdi, 2017). Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perwujudan cita-cita bangsa Indonesia untuk hidup yang lebih baik tanpa campur tangan pihak asing. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ernest Renan bahwa unsur yang membentuk negara bangsa ialah: (1). Jiwa atau asas kerohanian yang sama, berupa pandangan hidup dan sistem nilai; (2). Memiliki solidaritas besar, misalnya disebabkan persamaan nasib dalam sejarah; dan (3). Munculnya suatu bangsa merupakan hasil dari sejarah. Di sini, menurut teori Ernest Renan, munculnya negara bangsa karena adanya pandangan hidup dan sistem nilai yang sama (Jaya, 2019).

Kelahiran Indonesia sebagai sebuah bangsa merupakan perwujudan cita-cita masyarakat Indonesia yang mencapai titik kulminasinya pada tanggal 28 Oktober 1928. Dikatakan sebagai titik kulminasi, karena pada tempo tersebut merupakan arena berkumpulnya segenap elemen anak bangsa yang beraneka ragam Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat menyatakan sebuah ikrar untuk bertanah air dan berbangsa Indonesia serta menjunjung tinggi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ikrar tersebut juga tidak serta merta terjadi, tetapi telah melalui proses yang panjang, di mana pemuda yang tergabung sebagai pelopor pergerakan telah merintis dan membentuk organisasi sebagai bagian dari kesadaran nasional untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Kesadaran nasional tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya mereka dari golongan cerdik cendekia sebagai penjawantahan akan kerinduan mereka pada masa silam. Mereka menyadari bahwa jauh sebelum gagasan Indonesia hadir sebagai bangsa, wilayah ini yang masyhur dengan istilah Nusantara di masa lalu telah berdiri berbagai macam kerajaan yang memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur dan mengelola tanah airnya sendiri, lepas dan bebas dari cengkeraman bangsa asing. Akan tetapi kemasyhuran tersebut perlahan-lahan surut dengan masuknya bangsa asing yang membawa doktrin *gold, gospel, dan glory*, khususnya Bangsa Belanda yang berhasil merusak tatanan masyarakat Nusantara melalui politik *divide et impera*.

Memasuki alam kemerdekaan, Indonesia tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi negara ini pernah mengalami dan menghadapi berbagai macam gejolak dan gerakan yang

mencoba untuk melepaskan diri dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa Pemerintahan Soekarno yang lebih familiar dikenal dengan istilah Orde Lama, muncul gerakan yang dianggap sebagai gerakan separatis misalnya gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Andi Azis, Pemberontakan PKI Madiun, dan Gerakan 30 September PKI. Memasuki pemerintahan Soeharto (Orde Baru), gejolak keamanan pun masih terus menghangat. Yang paling menyita perhatian adalah Gerakan Aceh Merdeka yang melahirkan kebijakan Orde Baru untuk mengadakan operasi militer dan menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Memasuki era reformasi, Indonesia masih dilanda kemelut. Berbagai macam peristiwa yang dikhawatirkan akan mengarah pada tindakan destruktif kebangsaan. Peristiwa yang paling banyak menyita perhatian publik di negara ini ialah gonjang-ganjing menjelang pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang diikuti oleh tiga pasangan kontestan. Ada salah satu pasangan yaitu Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang cukup menyita perhatian publik, bukan hanya di DKI, tetapi masyarakat di luar DKI banyak yang menolaknya. Alasannya karena Ahok menyandang status minoritas ganda. Dia merupakan Warga Negara Indonesia keturunan Tiongkok sekaligus menganut Agama Kristen. Penolakan tersebut mengalami puncaknya ketika Ahok mengeluarkan pernyataan yang terkait dengan Surah al-Maidah di Pulau Pramuka, yang dinilai sebagai penistaan terhadap Agama Islam. Peristiwa tersebut sontak membuat sekelompok orang yang membingkai dirinya sebagai pembela alQuran melancarkan aksi yang berjilid-jilid. Pristiwa inilah yang menjadi titik tolak menguatnya gerakan politik identitas. Banyak kalangan yang menilai bahwa gerakan politik yang mengusung identitas keagamaan akan membahayakan posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang *berbhinneka tunggal ika*. Ada kekhawatiran jika Indonesia akan dilanda pertikaian sesama anak bangsa, sebagaimana yang terjadi di Kawasan Timur Tengah. Menghadapi kekhawatiran tersebut maka diperlukan sebuah gerakan kultural, yakni gerakan yang menempatkan agama dan nilai-nilai luhur bangsa sebagai basis dalam melakukan aktivitas sebagai anak bangsa dalam berbagai sektor kehidupan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena gejala (fenomena) yang menjadi fokus perhatian merupakan gejala sosial politik yang berkembang secara kontinu. Cara untuk mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan sumber utama yaitu telaah pustaka. Penelitian pustaka dilakukan dengan menelaah sejumlah buku, artikel, laporan penelitian, jurnal, tesis, disertasi. Selain itu penelitian pustaka juga dilakukan dengan menelusuri internet dan media cetak yang berhubungan dengan subjek penelitian.

## PEMBAHASAN

### Posisi Indonesia: Arena Multikepentingan Aktor Globalisasi

Ada sebuah realitas faktual bahwa salah satu megatrend yang tengah dihadapi dunia pasca perang dingin adalah kian meningkatnya globalisasi berkat kemajuan teknologi informasi. Globalisasi, sebagaimana yang diulas oleh Victor Segesvary, tidak menghasilkan homogenitas peradaban, tetapi justru melahirkan penemuan budaya-budaya lokal yang begitu luas. Pluralisme peradaban dengan demikian merupakan akibat saling pengaruh antara yang global dan yang lokal, yang universal dan yang partikular (Zubaedi, 2007).

Pada pihak lain, globalisasi menciptakan diferensiasi yang semakin terperinci dan rumit sehingga klaim kebenaran yang partikular dan yang lokal itu menjadi semakin mungkin. Dengan demikian, globalisasi memiliki efek ganda yakni di satu sisi globalisasi akan menciptakan kesadaran akan kehidupan yang majemuk, tetapi di lain sisi akan memunculkan eksklusivisme partikular. Pada sisi yang kedua inilah, perbedaan akan mudah mengalami perubahan menjadi perseteruan yang akan berujung pada aksi-aksi kekerasan, termasuk kekerasan yang mengatasnamakan agama tertentu.

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang merupakan salah satu pendorong globalisasi kian berkembang secara melesat dan seolah-olah tidak dapat dibendung. Globalisasi melanda semua negara yang ada di belahan bumi ini tanpa memperhatikan latar ekonomi, identitas sosial kultural, garis pandangan pemikiran politik, maupun identitas keagamaan. Globalisasi telah membuka lebar pintu pergaulan antar bangsa dalam berbagai sektor. Namun, pada sisi lain ada saja pihak-pihak baik yang mengatasnamakan negara maupun atas nama kelompok perusahaan yang menjadikan globalisasi sebagai media untuk memperluas dan memperbesar pengaruh mereka dalam pergaulan antar bangsa. Mereka semua

berlomba untuk menanamkan pengaruhnya terhadap negara lain, termasuk di Indonesia.

Dalam pergaulan antar bangsa, Indonesia menjadi sebuah arena ekonomi yang potensial dalam memasarkan produk. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah dibanjiri produk-produk impor berupa produk otomotif, obat-obatan, alat telekomunikasi, mainan anak, alat-alat perlengkapan rumah tangga, sistem pendidikan, ideologi, dan bahkan agama. Hal tersebut memang wajar, karena secara kuantitas Indonesia menempati urutan 4 duni dalam hal jumlah penduduk setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Penduduk yang demikian padat itu, sekitar 269.000.000 jiwa memang sangat potensial untuk dijadikan tempat untuk memasarkan barang-barang. Aktor-aktor utama globalisasi pun mengetahui bahwa secara umum masyarakat Indonesia ramah terhadap orang asing dan suka meniru. Mental yang suka meniru itulah yang dimanfaatkan sehingga produk-produk impor semakin mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia.

Globalisasi dan segala fitur didalamnya seperti deterritorialisasi, *interconnectedness*, dan interdependensi kemudian membawa masyarakat dunia kedalam sebuah era baru yang seakan-akan tanpa batasan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada akhirnya dianggap semakin melemahkan peran dan pengaruh negara terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat dunia. Hal tersebut kemudian mendorong peningkatan peran aktor-aktor non-negara seperti TNC, MNC, hingga kelompok teroris yang pada akhirnya saling berjuang untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Akan tetapi, agresivitas dan peranan aktor non-negara yang semakin meningkat tersebut juga memunculkan sebuah potensi konflik lain yang lebih besar. Mengapa demikian? Karena jika pada awalnya aktor negara sajalah yang dianggap sebagai aktor uniter dalam konflik internasional, di era globalisasi dewasa ini, konflik dapat disebabkan oleh benturan kepentingan antar aktor non-negara yang berupaya untuk mencapai tujuannya. Selain itu, patut dicatat pula bahwa pasca Perang Dingin aspek-aspek kultural kemudian memainkan peranan yang cukup vital dalam interaksi antar aktor internasional. Oleh karenanya, berbagai macam aspek kultural dan prestise sebagai salah satu fitur utamanya akan menjadi salah satu unsur mendasar bagi kepentingan yang hendak dicapai oleh para aktor internasional di era globalisasi dewasa ini (Suhipto, 2016).

Memasuki abad XXI, kondisi dunia semakin kompleks. Benturan peradaban sebagaimana yang telah diprediksi oleh Samuel P Huntington perlahan-lahan tapi pasti mulai

terbukti. Huntington begitu apik menjelaskan bahwa sumber konflik dalam dunia yang baru (dunia masa depan) ialah identitas dan agama. Huntington membagi dunia ke dalam beberapa peradaban besar yakni (1) Peradaban Barat yang meliputi Australia, Oceania, Eropa Barat dan Tengah, Amerika Serikat, dan Kanada (2) Peradaban Amerika Latin (3) Peradaban Orthodox yang menempatkan Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet sebagai pendukung utamanya (4) Peradaban Timur yang didukung oleh Tiongkok, Jepang dan Korea (5) Peradaban Timur Tengah Raya dan Muslim (6) Peradaban Sub Sahara di Afrika (6) Peradaban India (7) peradaban *lone country* semisal Israel, Etiopia dan Haiti (Huntington, 1996).

Lantas, bagaimana dengan posisi Indonesia? Jika melakukan penelaahan secara cermat, maka Indonesia dikelompokkan sebagai Peradaban Timur Tengah Raya dan Muslim. Hal ini cukup beralasan karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Muslim terbanyak di dunia. Dari segi ekonomi, Indonesia menempati urutan kedua dalam lingkungan negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-20. Kondisi demikian menempatkan Indonesia ibarat *juggernaut*, sebuah truk besar yang sedang melaju cepat karena dukungan penduduk yang banyak, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, serta keanekaragaman budaya yang khas. Namun suka atau tidak suka, di balik panggung Indonesia, ada tiga kekuatan aktor yang saling berebut untuk mengendalikan para pemain yakni kekuatan Peradaban Barat, Peradaban Tiongkok, dan Peradaban Timur Tengah Muslim.

### Peran Islam Dalam Membangun Nasionalisme

Paham nasionalisme dikembangkan untuk mempersatukan semua elemen yang ada pada suatu bangsa yang didasarkan pada rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, negara, ideologi dan politik. Ia merupakan suatu sikap politik dan sosial dari masyarakat yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Paham nasionalisme lahir di Eropa sekitar abad ke-15 M., kemudian berkembang ke Timur (Asia dan Afrika) pada abad ke-20 M. Berkembangnya paham nasionalisme ini dapat mempengaruhi wajah dunia dari sisi politik kekuasaan, dan memiliki dampak yang luas bagi negara-negara bangsa, baik di dunia Barat maupun di dunia Timur. Jauh sebelum paham nasionalisme masuk dan mempengaruhi dunia Timur, di sana sudah ada nilai-nilai Islam yang universal, yang berlaku dan dianut oleh masyarakat muslim serta menjadi unsur pemersatu di antara mereka. Nilai-nilai Islam telah mempengaruhi dan membentuk

kaum muslimin merasa senasib sepenanggungan dan memiliki kedekatan emosional dalam persaudaraan dengan mengabaikan perbedaan suku bangsa dan keturunan. Bagi kaum muslimin, kehadiran paham nasionalisme ini bersentuhan langsung dengan nilai-nilai Islam yang telah lebih lama berada di tengah-tengah mereka. Umat Islam menyikapi nasionalisme ini beragam, ada yang menerima, ada yang apriori, dan ada yang menolak (Mugiyono, 1983).

Nasionalisme dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai sebuah kata sakti yang mampu membangkitkan kekuatan berjuang melawan penindasan yang dilakukan kaum kolonialis selama beratus-ratus tahun lamanya. Perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami mampu mengalahkan perbedaan etnik, budaya dan agama sehingga lahir sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia (Kusumawardani, 2004). Menurut Geroge Mc Turnan Kahin Nasionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia (Anwar, 2017). Pada dasarnya, semangat nasionalisme tentu saja bukan hanya milik kaum sekuler, sebab dalam sejarah panjang perjuangan bangsa ini, justru banyak ditandai oleh kepeloporan organisasi-organisasi yang berasaskan keislaman seperti Sarikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah menjadi Sarikat Islam (SI), yang di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto, pada gilirannya berkembang menjadi sebuah gerakan nasionalis, yang anti kolonial, sangat tangguh, dan melampaui batas-batas etnis, geografis, dan selalu mempertautkan arti wawasan kebangsaan yang mereka miliki sebagai manifestasi dari Persaudaraan Islam dan Persaudaraan Sebangsa (Sage, 1996).

Merekatkan Islam dan keindonesiaan adalah sebuah proyek besar cendekiawan Muslim Indonesia sejak tahun 1970-an. Salah satu usahanya dengan mencoba membuka kembali akar-akar nasionalisme awal Indonesia dalam mengusir penjajah di bumi Nusantara ini. Islam dan keindonesiaan merupakan suatu formula untuk menjadikan Islam sebagai bagian dari bangsa yang memiliki rasa cinta tanah air dan keinginan yang sama untuk memajukan bangsa ini, tanpa ada stigma atas perjuangan umat Islam di tanah air ini (Setiawan, 2018).

Dalam konteks keindonesiaan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, membawa agama ke dalam ruang-ruang demokrasi bukan sekadar mencari pembenaran transendental tentang keabsahan demokrasi sebagai *the only game in town*, bukan pula sebatas mengeksploitasi simbolisme agama untuk mendongkrak perolehan

suara dalam pemilu. Atau membawa agama hanya sekedar untuk menutupi kelemahan, kekuarangan, dan ketidakmampuan melakukan hal yang semestinya. Lebih dari itu, agama secara subtil melandasi setiap gerak demokrasi sehingga keduanya bersenayawa ke dalam sebuah adonan kebudayaan dan peradaban profetik, liberatif, dan transformatif untuk seluruh elemen bangsa (Hilmy, 2017). Akan tetapi, bagi kelompok garis keras atau yang lebih familiar dengan istilah kelompok Islam Radikal, sistem negara hukum demokratis yang ada saat ini dianggap berciri sekuler dan tidak sesuai atau bertentangan dengan syariah berdasarkan pemahaman keagamaan mereka (Hardiman, 2018). Dalam situasi seperti ini, umat Islam secara internal menghadapi pergeseran pola konflik, dalam hal ini bukan lagi Islam berhadapan dengan negara seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, tetapi Islam berhadapan dengan sesamanya (Maliki, 2010). Sebagai misal, bagaimana perdebatan-perdebatan tentang sistem ketatanegaraan yang melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berhadapan dengan Hizbut Tahrir Indonesia.

Berbagai macam kelompok bermunculan dengan tawaran alternatif mereka dalam mengelola kenegaraan. Akan tetapi menurut Abdurrahman Wahid, selama kelompok tawaran-tawaran alternatif itu belum berhasil membuktikan penerimaan luas oleh masyarakat muslim sendiri, sudah selayaknya jika pandangan bahwa Islam merupakan faktor komplementer bagi ideologi Pancasila dianggap sebagai representasi dominan di kalangan massa Islam. Dengan demikian, pengertian kata umat Islam lalu mejadi umum, meliputi semua kaum muslimin di Indonesia. Demikian pula, format perjuangannya adalah partisipasi penuh dalam upaya membentuk Indonesia yang kuat, demokratis dan penuh keadilan di masa depan. Dan akhirnya, tujuan perjuangannya adalah memfungsikan Islam sebagai kekuatan integratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari masyarakat Indonesia. Ke sanalah hendaknya kesadaran massa Islam diarahkan dan dikembangkan oleh gerakan Islam di Indonesia (Wahid, 2000).

### **Urgensi Gerakan Sosiokultural Pada Masyarakat Indonesia**

Agama merupakan aspek transenden yang mengajarkan tentang nilai moralitas yang tinggi untuk mengatur kehidupan umat manusia. Agama mengatur kehidupan antar-manusia dalam pigura humanitas. Mementingkan manusia merupakan inti dari ajaran Islam. Oleh karena itu, di dalam teks Islam secara ontologis mengajarkan tentang humanitas yang *rahmatan lil alamin*. Namun demikian, secara historis aplikatif, perjalanan

Islam juga berbenturan dengan masalah kepentingan duniawai, misalnya kepentingan politik. Carut marut ajaran agama di dalam kehidupan manusia terjadi ketika wilayah agama diintervensi oleh politik (Syam, 2009).

Adalah hal yang sulit untuk dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia di tengah era globalisasi telah tergiring secara sukarela maupun terpaksa untuk mempergunakan produk-produk dari negara lain baik yang sifatnya materi maupun pemikiran. Kedatangan berbagai macam anasir-anasir kebudayaan asing bukan berarti masyarakat Indonesia harus pasif, tapi perlu pertimbangan yang kompleks dan matang dari segi beban ekonomi, sosial, dan politik dalam hal pemindahan atau peniruan kebudayaan itu. Agar tidak terbawa arus era globalisasi yang menghantarkan bangsa ini ke arah ketercerabutan akar budaya, maka perlu ada sikap untuk melakukan proses negosiasi yang kompleks dan menyaring produk-produk negara lain dengan cara melakukan pertimbangan dari segi kemanfaatan dan kemudharatan.

Sebagai agama yang mayoritas di negara ini, sudah sepatutnyalah Islam tampil sebagai pelopor utama dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa dan negara. Hal ini dapat terwujud ketika masyarakat Islam sudah memiliki konsep yang matang mengenai keterkaitan antara keindonesiaan dan keislaman di tengah masyarakat yang multikultural. Islam mesti dipahami sebagai ajaran yang bukan bermaksud untuk menegasikan kebudayaan lokal yang memiliki ajaran dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Islam justru tampil sebagai intipati yang berusaha untuk membersihkan dan memurnikan kebudayaan dari unsur-unsur yang menodai keagungan peradaban dan memberikan tuntunan kepada manusia dalam menjalani kehidupan berdasarkan ketetapan-ketetapan dari sang Pencipta. Umat Islam tidak mesti tertutup dengan kebudayaan dari luar, tetapi mesti menjadikan ajaran Islam sebagai penyaring agar identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan religius tetap terpelihara. Umat Islam Indonesia harus membebaskan diri dari sikap eksklusif karena menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang multi-etnis seperti Indonesia. Hal seperti itu disebabkan karena bagi kaum eksklusif memandang hanya pendapatnya yang paling benar dan yang lain salah dan harus ditiadakan bila perlu dimusnahkan dengan kekerasan karena bagi mereka bertentangan dengan ajaran agamanya. Model atau pola keberagamaan seperti ini biasanya bersifat puritan dan militan sehingga yang akhirnya menghasilkan gesekan pemahaman teks-teks keagamaan dan berujung pada konflik etnis-religious (Basyir, 2017).

Dalam konteks Indonesia, Islam telah menempatkan dirinya sebagai salah satu kekuatan politik (Herlyana, 2008) yang memiliki semangat dalam perjuangan. Perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam untuk menegakkan masyarakat yang baik, makmur, tertib, dan bermoral adalah perjuangan yang ada prinsipnya untuk menciptakan sebuah kehidupan yang lebih teratur. Menurut Abdurrahman Wahid, umat Islam menempuh dua cara dalam memperjuangkan sistem kehidupan sosial yang demokratis yakni: *pertama*, perjuangan yang mengidealisasi Islam sebagai satu-satunya sistem sosial yang mampu memelihara demokrasi sejati, kesetiaan pada hukum, dan keadilan ekonomi. Konsep yang populer dikenal dengan istilah proses islamisasi yang terjadi dalam kehidupan seluruh bangsa harus dipergunakan untuk mengangkat gagasan tentang suatu masyarakat Islam di Indonesia. *Kedua*, perjuangan Islam garis lunak, Islam memainkan peranan yang penting dalam kehidupan bangsa, ya digunakan bukan satu-satunya idealisasi Islam, tetapi hal itu hanya dasar inspirasi bagi suatu kerangka nasional suatu masyarakat demokratis. Perwujudan masyarakat yang baik berdasarkan Islam menurut Abdurrahman Wahid harus ditempuh tidak hanya dengan menggunakan idealisasi dalam Islam, hal itu hanya sebagai inspirasi saja, tetapi dapat ditempuh dengan berbagi alternatif situasi objektif yang ada dalam masyarakat (Jurdi, 2008).

Harus diakui bahwa masyarakat Islam saat ini masih berada dalam buritan peradaban. Akan tetapi proses pencerahan untuk mencapai posisi pemeran utama dalam kancah antar bangsa terus berlangsung secara kreatif dan kritis. Untuk mempercepat proses itu maka masyarakat Islam harus melepaskan diri dari kejumudan dengan memacu diri untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Hal ini penting, karena sebagian masyarakat Islam di Indonesia tengah beranjak dari masyarakat yang bercorak agraris dengan segala macam permasalahannya menuju masyarakat industrial yang tantangannya juga semakin ruwet dan kompleks. Secara politik, masyarakat Islam telah mampu berpartisipasi dalam panggung politik kekuasaan dan menunjukkan kondisi yang menggembirakan, tetapi belum terlalu meyakinkan karena masih banyak elite politik dan kekuasaan yang terjebak pada tindakan korupsi (Maarif, 2018). Pada sisi lain kekuatan Islam yang tampil dalam kekuasaan menghadapi dilema karena berada pada posisi yang terhimpit antara mempertahankan eksistensi sebagai salah satu kekuatan sosial politik yang selama ini dapat menjadi payung dari sekian kelompok elite ataupun sebagai Islam yang di depannya dihadapkan pada kekuasaan negara yang

diperebutkan secara bebas bahkan ia sendiri sedang tidak terhalang untuk memperolehnya (Huda, 2015).

Islam sebagai agama dan peradaban harus mampu tampil untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat tatanan kebangsaan. Dipahami bersama bahwa tempat dan kedudukan agama, termasuk agama Islam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agama ditempatkan sebagai salah satu wadah pembinaan dan pembentukan karakter bangsa, yang senantiasa ditempatkan untuk memandu warga negara Indonesia sebagai warga bangsa yang berketuhanan dan berkeadaban (religius). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama harus ditempatkan pada beberapa posisi, antara lain. *Pertama*, agama memiliki fungsi motivatif. Agama harus dipahami bukan hanya sebagai penuntun untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, melainkan agama harus menjadi sumber inspirasi dalam menata dan memperbaiki kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan pembangunan harus dimulai dengan pola hidup rukun agar potensi konflik atas nama agama dapat dihindari. Dari fungsi motivatif ini, Islam harus mampu tampil sebagai kekuatan dalam menumbuhkan dimensi-dimensu kultural seperti pendidikan, transformasi nilai-nilai substansial, kesadaran kolektif, rasionalisasi tindakan, kontekstualisasi ajaran Islam, dan berakhir pada pencerdasan bangsa secara holistik dan liberatif-transformatif (Jamil, 2013).

*Kedua*, agama sebagai sumber kreatifitas. Dalam hal ini agama pada titik sentralnya berada pada ruang kebebasan untuk membangun masyarakat yang lebih manusiawi atau yang lebih sesuai dengan posisi manusia yang luhur dalam bingkai peradaban. Salah satu unsur yang paling penting dalam kebudayaan adalah norma sosial yang bersumber dari ajaran agama. Agama merupakan semesta simbolik yang memberi makna pada kehidupan manusia dan memberikan penjelasan yang paling sempurna dan komprehensif tentang seluruh realitas, yaitu realitas fisik dan metafisikal, realitas rasional dan suprarasional, realitas imanental dan transendental. Agama merupakan naungan sakral yang melindungi manusia dari keputusasaan, kekacauan dan situasi tana makna. Agama merupakan tumpuan dan harapan sosial yang dapat dijadikan sebagai pemecah masalah terhadap berbagai situasi yang diakibatkan oleh manusia sendiri. Beban berat bagi agama adalah beban berat bagi penganutnya, institusinya, dan semua agamawan karena pemecahan masalah dilakukan bukan oleh agama, melainkan oleh berbagai metode dan pendekatan yang dianut oleh setiap penganut

agama dengan latar belakang pemahaman yang berbeda-beda.

Ketiga, agama sebagai sarana integratif. Dalam konteks ini Islam memiliki cita-cita agar semua warga negara yang ada dalam Negara Indonesia harus saling bahu membahu dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Dalam cita-cita besar Islam yang sesungguhnya, masyarakat muslim yang diidamkan bukanlah masyarakat yang dimana hanya orang-orang muslim diberikan hak-haknya dan dianggap penduduk, melainkan semua individu juga diberi hak-haknya dalam kerangka hukum (Ninsiana, 2016). Peranan sosial agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat berarti peran agama dalam menciptakan suatu ikatan bersama, baik diantara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan sehingga agama menjamin adanya konsensus dalam masyarakat. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya konsep sakral yang melingkupi nilai-nilai keagamaan sehingga hal tersebut tidak mudah untuk dirubah dan memiliki otoritas yang kuat di masyarakat. Dengan mendasarkan pada perspektif fungsionalis, Thomas F. O'Dea mengungkapkan bahwa agama memiliki fungsi dalam menyediakan dua hal. Pertama, suatu cakrawala pandangan tentang dunia luar yang tidak terjangkau oleh manusia (*beyond*). Kedua, sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal diluar jangkauannya, yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi manusia. Lebih jauh, dengan mendasarkan pada dua hal diatas, ia mengungkapkan enam fungsi agama sebagai berikut:

- a. Agama mendasarkan perhatiannya pada sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia yang melibatkan takdir dan kesejahteraan, agama menyediakan sarana emosional penting yang membantu manusia dalam menghadapi ketidakpastian.
- b. Agama menawarkan suatu hubungan transendental melalui pemujaan dan upacara peribadatan, karenanya agama memberikan dasar emosional bagi rasa aman baru dan identitas yang lebih kuat ditengah kondisi ketidakpastian dan ketidakmungkinan yang dihadapi manusia.
- c. Agama mensucikan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat yang telah terbentuk, mempertahankan dominasi tujuan kelompok diatas kepentingan individu dan disiplin kelompok diatas

dorongan hati individu. Dengan demikian agama berfungsi untuk membantu pengendalian sosial, melegitimasi alokasi pola-pola masyarakat sehingga membantu ketertiban dan stabilitas.

- d. Agama juga melakukan fungsi yang bertentangan dengan fungsi sebaliknya, yaitu memberikan standar nilai dalam arti dimana norma-norma yang sudah terlembaga bisa dikaji kembali secara kritis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama agama yang menitikberatkan pada transendensi Tuhan dan pada masyarakat yang mapan.
- e. Agama melakukan fungsi-fungsi identitas yang penting. Melalui peranserta manusia dalam ritual agama dan do'a, mereka juga melakukan unsur-unsur signifikan yang ada dalam identitasnya. Dalam periode perubahan dan mobilitas sosial yang berlangsung cepat, sumbangan agama terhadap identitas menjadi semakin tinggi. Salah satu contoh tentang hal ini dikemukakan oleh Will Herberg melalui studinya tentang sosiologi agama Amerika di tahun 1950-an, dimana salah satu cara penting dimana orang Amerika membentuk identitasnya adalah dengan menjadi salah satu anggota dari "tiga agama demokrasi", yaitu: Protestan, katolik, dan Yahudi.
- f. Agama juga berperan dalam memacu pertumbuhan dan kedewasaan individu, serta perjalanan hidup melalui tingkat usia yang ditentukan oleh masyarakat. Dari keenam fungsi yang dijalankan oleh agama diatas, nampak bahwa agama memiliki peran yang urgen tidak hanya bagi individu tetapi sekaligus bagi masyarakat. Bagi individu, agama berperan dalam mengidentifikasi individu dengan kelompok, menghibur ketika dilanda kecewa, memperkuat moral, dan menyediakan unsur-unsur identitas. Sedangkan bagi kehidupan bermasyarakat, agama berfungsi menguatkan kesatuan dan stabilitas masyarakat dengan mendukung pengendalian sosial, menopang nilai-nilai dan tujuan yang mapan, dan menyediakan sarana untuk mengatasi kesalahan dan keterasingan (Arfin, n.d.).

Dengan demikian, pemikiran keagamaan khususnya masalah etika dan esensi nilai-nilai keislaman akan mewarnai sistem penyelenggaraan dan perpolitikan negara Indonesia. Harapannya, Islam yang mengedepankan gerakan sosiokultural dapat mempengaruhi masa depan bangsa, dan

dapat dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan standar wawasan kebangsaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki latar kebudayaan yang beranekaragam membutuhkan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan yang universal, yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan dan menjauhi nuansa kekerasan. Menurut Ahmad Fuad Fanani, Islam tetap terbuka terhadap agama atau paham lain yang juga pasti mengandung kebenaran. Islam harus mengakui kebenaran agama lain, namun juga tetap menjaga komitmen nilai-nilai luhur yang ada pada dirinya. Penghargaan dan sikap terbuka terhadap kebenaran yang lain, justru akan menjadikan Islam dan agama lainnya bisa saling mengkritik, mengetahui kelemahan, dan mengevaluasi untuk mencipta langkah yang lebih bagus di masa depan. Maka, dialog antara Islam dengan umat dan paham lainnya, harus digalakkan dan dilanjutkan dengan kerjasama konkret untuk mengatasi persoalan sosial yang ada di sekitar kita (Fanani, 2004).

Sekarang ini saat yang tepat bagi para pemimpin Muslim Asia Tenggara secara umum, khususnya lagi Indonesia, untuk menyadari bahwa ada masalah radikalisme yang serius di antara individu dan kelompok Muslim tertentu. Masalah ini haruslah ditanggapi secara bijaksana oleh para pemimpin moderat secara bersama-sama dengan para penegak hukum. Inilah upaya yang tepat mempertahankan wajah Islam sebagai agama damai dan demi kepentingan Muslim Indonesia dan Asia Tenggara sebagai 'masyarakat Islam yang damai'. Jelas, radikalisme ini dapat dilihat padadua level; pertama, kekerasan dan manipulasi untuk membenarkan radikalisme dan terorisme dengan mengutip doktrin-doktrin Islam tertentu. Tidak ragu lagi, kekerasan dapat muncul karena interpretasi secara literal terhadap Islam. Kedua, penggunaan kekerasandan terorisme jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam. Karena itu, sekarang saat yang tepat bagi para pemimpin Muslim moderat untuk berbicara lebih jelas dan lantang bahwa interpretasi secara literal terhadap Islam hanya menghasilkan ekstrimisme, dan itu tidak dapat diterima dan ditoleransi nilai-nilai Islam. Tidak ada alasan apapun bagi setiap Muslim untuk melakukan tindakan pengrusakan atau pembunuhan pihak lain, baik dari kalangan Muslim atau non-Muslim. Berbagai macam kebencian dan kemarahanyang dirasakan individu dan kelompok Islam manapun tidak seharusnya dibalas dengan keputusan dan berbagai bentuk sikap tidak manusiawi (Azra, 2012).

Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis maka dibutuhkan pengembangan, pembinaan dan peningkatan kerukunan antarumat beragama. Ada dua kebijakan strategis yang masih relevan untuk terus

dikembangkan ke depan dalam rangka pembinaan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. *Pertama*, pengembangan ketahanan masyarakat lokal yang meliputi (1) fungsionalisasi pranata lokal, seperti menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat dan tradisi setempat yang mendukung upaya kerukunan (2) menggali nilai-nilai dan norma-norma, kearifan-kearifan lokal yang kondusif yang menunjang kerukunan (3) mengembangkan lembaga-lembaga baru yang moderen seperti pembentukan forum-forum kerukunan sampai ke masyarakat bawah (4) memperluas partisipasi segenap kelompok dan lapisan masyarakat dengan lebih mengembangkan pendekatan dari bawah ke atas melalui kegiatan-kegiatan, seperti: dialog, tatap muka, sarasehan, pendataan, monitoring, dan kerja sama sosial. *Kedua*, kebijakan strategis selanjutnya ialah dengan cara mengembangkan wawasan multikultural. Kebijakan strategis ini bisa dijabarkan ke dalam berbagai program kegiatan bersama sebagai berikut: (1) memberikan pembekalan kepada tokoh dan pemimpin masyarakat lokal tentang wawasan dan pengetahuan yang bermuatan pendidikan multikultural dan pengetahuan dasar tentang ajaran agama lain, serta kemampuan mengelola setiap konflik yang muncul di tengah masyarakat mereka sendiri agar tidak menimbulkan konflik terbuka (2) menyebarkan publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kehidupan dan hubungan antarumat beragama (3) mencegah jangankan sampai agama digunakan untuk kepentingan-kepentingan merugikan yang merugikan persatuan dan kesatuan bangsa (Ismail, 2019).

## KESIMPULAN

Dalam menghadapi berbagai gejala dan pemikiran yang hendak mengingkari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sebagai golongan mayoritas di negara ini, Islam harus mampu memberikan jawaban atas permasalahan itu. Disadari bahwa nasionalisme atau kebangsaan tentu memiliki pelbagai musuh atau ancaman. Karena itu tidak dapat dipungkiri, pada dasarnya bangsa ini memiliki keragaman etnis, bahasa, sub kultur, agama yang berkeinginan untuk membentuk satu kesatuan di bawah naungan Pancasila. Bahwa kebangsaan Indonesia yang dibangun dari bermacam-macam sub kultur, agaknya memang diperlukan evaluasi secara berkelanjutan dengan pemikiran yang komprehensif. Islam, Negara dan budaya tidak dapat dipandang secara dikotomis, melainkan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan negara kebangsaan yang berorientasi

pada penciptaan masyarakat yang mengedepankan emansipasi kemanusiaan dan keadaban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. (2017). INTERNALISASI SEMANGAT NASIONALISME MELALUI PENDEKATAN HABITUASI (Perspektif Filsafat Pendidikan). Analisis : Jurnal Studi Keislaman, 14(1), 159–172. <https://doi.org/10.42042/ANALISIS.V14I1.653>
- Arfin, A. Z. (n.d.). Fungsi Sosial Agama. Retrieved November 12, 2019, from <https://arifinzain.wordpress.com/2008/01/31/fungsi-sosial-agama/>
- Azra, A. (2012). Revisitasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia. Indo-Islamika, 1(2), 233–244. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0112658>
- Basyir, K. (2017). Perjumpaan Agama dan Budaya : Melacak Konsep dan Ideologi Gerakan Keagamaan di Indonesia A . Pendahuluan Abad 21 M sebagai milenium ketiga merupakan era kebangkitan agamayang dibarengi dengan meningkatnya dinamika kebudayaan manusia yang dinamis sehingga , 11, 299–328.
- Boty, M. (2017). Masyarakat Multikultural : Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu dengan Non Melayu pada Masyarakat Sukabangun Palembang. Jsa, 1(2), 1–17.
- Fanani, A. F. (2004). Islam Mashab Kritis. Jakarta: Kompas.
- Hardiman, F. B. (2018). Demokrasi dan Sentimentalis. Yogyakarta: Kanisius.
- Herlyana, E. (2008). Gerakan Islam Politik : Angan-Angan Persatuan Dalam Keterpecahan. Sosio-Religia, Vol. 7(No. 3).
- Hilmy, M. (2017). Jalan Demokrasi Kita. Malang: Intrans Publishing.
- Huda, M. Q. (2015). Relasi Budaya dan Kuasa dalam Konstruksi Islam Kultural Pasca-Reformasi. Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, 3(1), 146. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.146-180>
- Huntington, S. P. (1996). Benturan Antar Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia. Yogyakarta: Qalam.
- Ismail, F. (2019). Islam, Konstitusionalisme, Dan Pluralitas. Yogyakarta: Ircisod.
- Jamil, M. M. (2013). Revitalisasi Islam Kultural. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 21(2), 271. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.245>
- Jaya, A. C. (2019). KONSEP NATION-STATE DALAM PEMIKIRAN IDEOLOGI POLITIK MELAYU ISLAM PADA ABAD KE-19 M (Studi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1787-1854)). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 15(1), 1–25. <https://doi.org/10.24042/tps.v15i1.3684>
- Jurdi, S. (2008). Pemikiran Politik Islam Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumawardani, A. (2004). Nasionalisme. Archives de m??Decine Sociale, 7(1), 38–48.
- Maarif, A. S. (2018). Islam dan Politik. Yogyakarta: Ircisod.
- Maliki, Z. (2010). Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mugiyono. (1983). Relasi Nasionalisme Dan Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Dunia Islam Global. Jurnal Ilmu Agama, 15(2), 1–11. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/492>
- Ninsiana, W. (2016). Islam dan Integrasi Sosial dalam Cerminan Masyarakat Nusantara. Akademika, Vol. 21, N(Juli-Desember 2016), 357–376.
- Sage, L. A. (1996). Sebuah Catatan Sudut Pandang Siswono Tentang Nasionalisme Dan Islam. Jakarta: Jakarta Citra Media.
- Setiawan, I. S. (2018). Islam dan Nasionalisme: Pandangan Pembaharu Pendidikan Islam Ahmad Dahlan dan Abdulwahab Khasbullah. Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.21009/hayula.002.1.01>
- Suhito, Y. P. (2016). Kontestasi Kultural : dari Clash of Civilizations hingga Aksi



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL LP2M UNM - 2019**  
***"Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia"***  
**ISBN: 978-623-7496-14-4**

- Terorisme Global. Retrieved November 10, 2019, from [http://yohanesputrasuhito-fisip14.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-159043-Studi Hubungan Kultural Dunia-Kontestasi Kultural: dari Clash of Civilizations hingga Aksi Terorisme Global.html](http://yohanesputrasuhito-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-159043-Studi_Hubungan_Kultural_Dunia-Kontestasi_Kultural:_dari_Clash_of_Civilizations_hingga_Aksi_Terorisme_Global.html)
- Syam, N. (2009). *Tantangan Multikulturalisme di Indonesia* (5th ed.). Yogyakarta: Impulse.
- Wahid, A. (2000). *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: Lkis.
- Zubaedi. (2007). *Islam Dan Benturan Antarperadaban*. Yogyakarta: Arruz Media.
- Zuhdi, S. (2017). *Integrasi Bangsa Dalam Bingkai Keindonesiaan*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.